

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



beyond construction

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Konstruksi - Energi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*) - Properti - Industri – Investasi

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat :

Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 - Indonesia

Telp.: (021) 797-5312, Faksimili: (021) 797-5311

Website: www.adhi.co.id

Alamat e-mail: adhi@adhi.co.id

Memiliki 5 (lima) departemen operasional dan 5 (lima) Entitas Anak

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.997.000.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.029.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp556.000.000.000,- (lima ratus lima puluh enam miliar) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp473.500.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU/MATERIAL. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI FAKTOR RISIKO.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

A-(Idn)

(*Single A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	16 Juni 2017
Masa Penawaran	:	19 – 20 Juni 2019
Tanggal Penjataan	:	21 Juni 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	25 Juni 2019
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	25 Juni 2019
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	26 Juni 2019

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019."

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.029.500.000.000,- (satu triliun dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp556.000.000.000,- (lima ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp473.500.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019	
	Seri A	Seri B
1	25 September 2019	25 September 2019
2	25 Desember 2019	25 Desember 2019
3	25 Maret 2020	25 Maret 2020
4	25 Juni 2020	25 Juni 2020
5	25 September 2020	25 September 2020
6	25 Desember 2020	25 Desember 2020
7	25 Maret 2021	25 Maret 2021
8	25 Juni 2021	25 Juni 2021

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019	
	Seri A	Seri B
9	25 September 2021	25 September 2021
10	25 Desember 2021	25 Desember 2021
11	25 Maret 2022	25 Maret 2022
12	25 Juni 2022	25 Juni 2022
13		25 September 2022
14		25 Desember 2022
15		25 Maret 2023
16		25 Juni 2023
17		25 September 2023
18		25 Desember 2023
19		25 Maret 2024
20		25 Juni 2024

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jln. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790 - Indonesia
Telp: (021) 791 75000 Fax: (021) 7990720
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Web: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-332/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan dipertegas kembali dengan surat Pefindo No. RTG-054/PEF-DIR/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

idA- (A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 April 2019 sampai dengan 1 April 2020.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Hak Senioritas atas Utang

Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan Mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat di Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di Surat Kabar Harian;
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h diatas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - v. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan jumlah Obligasi yang hendak dijual oleh setiap Pemegang Obligasi yang hendak melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatas, dengan ketentuan:
 - i. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- n. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dan
- q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

- i. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- ii. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan, yang tidak diaudit, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, yang merupakan bagian dari Informasi Tambahan. Seluruh kewajiban Perseroan pada tanggal Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2019 sudah diungkapkan dalam Informasi Tambahan. Perbedaan pada penjumlahan angka akhir disebabkan oleh pembulatan pada laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp18.520.230 juta dan Rp4.944.878 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2019
Utang usaha	
Pihak berelasi	85.521
Pihak ketiga	7.118.334
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	3.450.499
Utang bruto subkontraktor	
Pihak berelasi	691.038
Pihak ketiga	4.192.069
Utang pajak	430.013
Uang muka pemberi kerja	907.438
Pendapatan diterima di muka	60.482
Beban akrual	820.260
Utang obligasi	249.953
Utang retensi	430.502
Liabilitas jangka pendek lainnya	84.122
Jumlah liabilitas jangka pendek	18.520.230
Liabilitas pajak tangguhan	16.462
Utang retensi	11.602
Uang muka pemberi kerja	20.460
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	1.227.220
Utang obligasi	3.492.551
Utang lain-lain	35
Liabilitas imbalan kerja	176.547
Jumlah liabilitas jangka panjang	4.944.878
JUMLAH LIABILITAS	23.465.108

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, dengan auditor penanggung jawab Rusli, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, dan Karunawan, auditor independen, dengan auditor penanggung jawab Drs. Hertanto, M.S. Ak., CPA., CPMA., CA. dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Perbedaan pada penjumlahan angka akhir disebabkan oleh pembulatan pada

laporan keuangan. Laporan keuangan 31 Maret 2019 dan 2018 serta periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut tidak diaudit.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret		Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2019*	2018	2018	2017
Pendapatan Usaha	2.328.122	3.141.877	15.655.500	15.156.178
Beban pokok pendapatan	2.010.074	2.710.014	13.148.896	13.098.372
Laba Kotor	318.048	431.863	2.506.603	2.057.806
Beban Usaha				
Beban penjualan	(9.755)	(5.738)	(33.801)	(27.077)
Beban umum dan administrasi	(135.081)	(118.147)	(673.871)	(553.999)
Jumlah Beban Usaha	(144.836)	(123.885)	(707.672)	(581.077)
Laba Usaha	173.212	307.977	1.798.931	1.476.730
Pendapatan (beban) lainnya – bersih	20.411	(4.758)	(241.898)	(305.627)
Beban keuangan	(147.449)	(118.235)	(523.744)	(444.763)
Bagian laba ventura bersama	80.473	2.102	134.487	230.942
Beban pajak penghasilan final	(49.019)	(112.648)	(518.273)	(438.299)
Laba Sebelum Pajak	77.629	74.438	649.504	518.983
Beban pajak penghasilan tidak final	(2.009)	(1.061)	(4.475)	(1.923)
Jumlah beban pajak penghasilan – bersih	(2.009)	(1.061)	(4.475)	(1.923)
Laba Tahun/Periode Berjalan	75.619	73.377	645.029	517.060
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya Setelah Pajak				
Pos-pos yang Tidak Akan di Reklasifikasi ke Laba Rugi:				
Pengkukuran kembali program imbal kerja pasti	-	-	(131.771)	7.520
Surplus revaluasi tanah	-	-	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih penjabaran mata uang asing	-	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	75.619	73.377	513.258	524.579
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	75.540	73.282	644.159	515.415
Kepentingan Non-Pengendali	79	94	871	1.645
Jumlah	75.619	73.377	645.029	517.060
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	75.540	73.282	512.387	522.935
Kepentingan Non-Pengendali	79	94	871	1.645
Jumlah	75.619	73.377	513.258	524.579
LABA PER SAHAM DASAR	21,21	20,58	181	145

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019*	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	1.998.125	3.263.037	4.131.174
Piutang usaha			
Pihak berelasi	896.163	1.051.426	826.326
Pihak ketiga	2.607.356	2.303.102	2.096.482
Piutang retensi			
Pihak berelasi	401.742	406.587	418.418
Pihak ketiga	352.304	336.507	397.993
Tagihan bruto pemberi kerja			
Pihak berelasi	2.474.405	2.447.076	2.853.739

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2019*	2018	2017	
Pihak ketiga	9.718.757	8.806.760	8.473.901	
Piutang lain-lain	12.398	12.398	13.080	
Persediaan	3.846.680	4.360.891	3.683.145	
Uang muka	677.575	586.690	391.836	
Biaya dibayar di muka	255.260	251.283	276.734	
Pajak dibayar di muka	1.426.218	1.371.857	867.955	
Aset lancar lainnya	134.717	231.930	386.888	
Jumlah Aset Lancar	24.801.701	25.429.544	24.817.671	
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain jangka panjang	7.322	7.156	5.461	
Aset real estat	1.139.100	884.458	712.921	
Investasi pada ventura bersama	756.678	636.887	488.812	
Properti investasi	861.657	902.387	354.844	
Aset tetap - neto	1.541.925	1.573.324	1.520.931	
Investasi jangka panjang lainnya	315.654	315.654	9.054	
Aset lain-lain	401.963	369.206	423.255	
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.024.298	4.689.071	3.515.277	
JUMLAH ASET	29.825.999	30.118.615	28.332.948	
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	85.521	529.587	312.730	
Pihak ketiga	7.118.334	6.254.339	5.722.075	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	3.450.499	3.663.961	3.537.107	
Utang bruto subkontraktor				
Pihak berelasi	691.038	387.330	476.117	
Pihak ketiga	4.192.069	5.376.469	5.100.049	
Utang pajak	430.013	386.348	381.375	
Uang muka pemberi kerja	907.438	841.916	665.778	
Pendapatan diterima di muka	60.482	48.239	163.561	
Beban akrual	820.260	748.102	644.718	
Utang obligasi	249.953	249.917	124.986	
Utang retensi	430.502	401.830	314.009	
Utang sukuk	-	-	125.000	
Liabilitas jangka pendek lainnya	84.122	76.266	65.784	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.520.230	18.964.304	17.633.289	
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan	16.462	16.462	17.827	
Utang retensi	11.602	12.249	10.853	
Uang muka pemberi kerja	20.460	24.168	80.271	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	1.227.220	1.147.399	925.000	
Utang obligasi	3.492.551	3.492.179	3.740.464	
Utang lain-lain	35	35	35	
Liabilitas imbalan kerja	176.547	176.547	55.291	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.944.878	4.869.039	4.829.741	
JUMLAH LIABILITAS	23.465.108	23.833.343	22.463.031	
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham modal dasar – 14.000.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.560.849.376 saham	356.085	356.085	356.085	
Tambahan Modal Disetor	2.588.834	2.588.834	2.588.834	
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali	3.118	3.118	3.118	
Saldo Laba: Ditentukan Penggunaannya	2.348.679	2.348.679	2.027.797	
Saldo Laba: Belum Ditentukan Penggunaannya	719.699	644.159	418.029	
Komponen ekuitas lainnya				
Selisih penjabaran mata uang asing	-	-	-	
Kerugian aktuarial atas program imbal pasti	(130.941)	(130.941)	830.635	
Surplus revaluasi tanah	464.551	464.551	464.551	
Subjumlah Ekuitas	6.350.025	6.274.485	5.859.246	
Kepentingan Non Pengendali	10.866	10.787	10.672	
Jumlah Ekuitas	6.360.891	6.285.272	5.869.917	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.825.999	30.118.615	28.332.948	

*tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

	31 Maret		31 Desember	
	2019*	2018	2017	
Rasio Pertumbuhan (YoY)				
Pendapatan	(25,90%)	3,29%		36,99%
Beban Pokok Pendapatan	(25,83%)	0,39%		31,66%
Laba Usaha	(43,76%)	21,82%		124,03%
Laba Tahun Berjalan	3,06%	24,75%		64,09%
Jumlah Aset	9,44%	6,30%		41,40%
Jumlah Liabilitas	10,11%	6,10%		53,91%
Jumlah Ekuitas	7,03%	7,08%		7,85%
Rasio Profitabilitas				
Marjin Laba Bersih	3,24%	4,11%		3,40%
Marjin Laba Kotor	13,66%	16,01%		13,58%
EBITDA/Jumlah Aset	1,08%	6,21%		5,37%
EBITDA/Pendapatan	14%	12%		10%
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	2,72%	4,90%		30,65%
Imbal Hasil Ekuitas	1,20%	11,45%		9,83%
Imbal Hasil Aset	0,42%	3,88%		3,38%
Rasio Keuangan				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	3,69	3,79		3,83
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,79	0,79		0,79
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	1,34	1,34		1,41

*tidak diaudit

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan	Perjanjian Kredit
Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Current ratio	1 x
DER	2,75 x
Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")	1 x
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Current ratio	1 x
DER	3,5 x
Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")	1 x

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

1. Keterangan Tentang Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya" yang diundangkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1961 serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 86 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2220. Perseroan pada awalnya bernama "Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya" sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1969. Peraturan Pemerintah ini telah termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 52 Tahun 1971.

Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas No. 1 tertanggal 1 Juni 1974, yang kemudian dirubah dengan Akta Perubahan No. 2 tanggal 3 Desember 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah menadapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya tertanggal 7 Januari 1975 No. Y.A 5/5/13 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 1975 No. 85 Tambahan No. 600.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Adhi Karya No. 28 tanggal 15 Juli 2008, dibuat dihadapan DR.Amrul Partomuan Pohan, S.H.,LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-49910.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 24 Maret 2009, Tambahan No.8682.

Anggaran Dasar kemudian dirubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.58 tanggal 28 April 2014, dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No.AHU-02123.40.20.2014 tanggal 29 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02123.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, mengenai perubahan Pasal 3 dengan adanya penambahan bidang usaha.

Guna menyesuaikan dengan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 11 Mei 2015, dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0921714 tanggal 13 Mei 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504315.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No.513/L.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian dirubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.35 tanggal 22 Desember 2015 ("**Akta No.35 Tanggal 22 Desember 2015**"), dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0990446 tanggal 22 Desember 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3596988.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Desember 2015, mengenai peningkatan modal disetor Perseroan.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk" No. 12 Tanggal 4 Mei 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012001.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0211420 tanggal 31 Mei 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075854.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk" No. 12 Tanggal 4 Mei 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012001.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0211420 tanggal 31 Mei 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075854.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018, Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham		Nilai Nominal (Rp.)	%
	Seri A Dwiwarna @ Rp.100,00	Seri B @ Rp.100,00		
Negara Republik Indonesia	1	-	100	0,00
	-	1.816.046.623	181.604.662.300	51,00
		Total	181.604.662.400	51,00
Masyarakat	-	1.744.802.752	174.480.275.200	49,00
		Total	174.480.275.200	49,00
Jumlah	1	-	100	0,00
	-	3.560.849.375	356.084.937.500	100,00
		Total	356.084.937.600	100,00

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dibuat di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019 oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn yang merupakan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (yang

disampaikan mendahului dari akta tersebut di atas), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Mochamad Fadjroel Rachman
Komisaris	:	Bobby Achirul Awal Nazief
Komisaris	:	Wicipto Setiadi
Komisaris Independen	:	Abdul Muni
Komisaris Independen	:	Hironimus Hilapok

Direksi

Direktur Utama	:	Budi Harto
Direktur Keuangan	:	Entus Asnawi Mukhson
Direktur SDM	:	Agus Karianto
Direktur Operasi I	:	Budi Saddewa Soediro
Direktur Operasi II	:	Pundjung Setya Brata
Direktur <i>Quality, Health Safety and Environmental</i>	:	Partha Sarathi

4. Kegiatan Usaha

Sebagaimana tertuang pada Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Akta No. 12 tanggal 4 Mei 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar, ruang lingkup bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan meliputi:

a. Konstruksi

Melaksanakan pembangunan pekerjaan sipil maupun gedung bertingkat (high-rise building) termasuk fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan dan dermaga, jalan dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi, fasilitas olahraga dan lainnya. Lini bisnis ini ditangani oleh departemen-departemen operasional, seperti Departemen Infrastruktur I, Departemen Infrastruktur II, Departemen Light Rail Transit (LRT) serta anak perusahaan PT Adhi Persada Gedung. Proses bisnis konstruksi pada umumnya dimulai dari tahapan perolehan kontrak yang terdiri dari kegiatan Info Pasar, PQ, Pra Lelang & Lelang dan Kontrak. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan proyek yang terdiri dari kegiatan Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan.

b. Energi (Engineering, Procurement and Construction/EPC)

Lini bisnis ini ditangani oleh Departemen EPC dan terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap engineering (basic design, detail design, instrument design dan commissioning design termasuk di dalamnya kegiatan procurement) dan tahap construction phase (civil work dan non-civil work). Perseroan memfokuskan kegiatan usaha EPC pada Power Plant, Oil & Gas, dan Industrial Plant. Dalam hal ini EPC memainkan peran dalam memperluas penciptaan nilai (value creation).

c. Properti

Dalam menjalankan bisnis properti, Perseroan juga mengembangkan kawasan gedung bertingkat, baik untuk komersial, perkantoran maupun residensial, dan hotel. Selain itu, Perseroan turut mengembangkan kawasan residensial yang berkualitas seperti rumah hunian, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko) dan pusat perbelanjaan (mall) baik itu dalam pengembangan lahan maupun dalam pengembangan desain pemukiman dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu properti yang terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat ini sedang dibangun oleh Perseroan.

Proses bisnis properti dibagi dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu inisiasi, pengembangan, konstruksi, dan operasi, yang ditangani oleh anak perusahaan PT Adhi Commuter Properti (ACP) dan PT Adhi Persada Properti (APP). Sedangkan, proses bisnis hotel dibagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu inisiasi, desain, rencana bisnis dan perijinan, pelaksanaan konstruksi, operasional hotel, monitoring & pengendalian yang juga dijalankan oleh PT Adhi Commuter Properti (ACP).

d. Industri

Perseroan menggarap industri manufaktur melalui anak perusahaannya yaitu PT Adhi Persada Beton (APB) dengan memproduksi dan memperdagangkan beton pracetak serta kegiatan usaha terkait.

e. Investasi

Proses bisnis investasi infrastruktur yang dilakukan Perseroan meliputi investasi pada proyek air bersih dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dengan tagline "Beyond Construction" yang kini dimiliki, Perseroan terus

melebarkan sayap bisnisnya tak hanya lewat konstruksi. Perseroan juga berinvestasi dalam beberapa proyek di dalam negeri.

5. Prospek Usaha

Di tahun 2019 sektor konstruksi masih menjadi salah satu fokus pemerintahan yang didukung oleh keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur, yang telah dimulai sejak tahun 2015. Infrastruktur juga merupakan salah satu belanja APBN yang bersifat prioritas dan mandatory, meningkat sebesar 1,1% di tahun 2019 menjadi Rp415,0 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp410,4 triliun. Anggaran infrastruktur tahun 2019 tersebut akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp173,8 triliun, melalui transfer ke daerah & dana desa sebesar Rp196,2 triliun dan melalui pembiayaan sebesar Rp45 triliun.

Pemerintah memiliki rencana yang cukup agresif dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Di RPJMN 2015-2019, pemerintah mengalokasikan Rp5.519 triliun, dengan anggaran terbesar pada sektor transportasi laut yaitu Rp900 triliun. Pembiayaan proyek infrastruktur transportasi pada RPJMN ditargetkan dari berbagai sumber dana yaitu APBN, APBD, BUMN, dan swasta dengan persentase yang berbeda untuk tiap sektor. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi BUMN untuk mendapatkan proyek konstruksi atau berinvestasi dalam proyek tersebut.

Sektor Residensial dan Komersial memiliki peluang yang besar baik dari segmen konstruksi maupun realti. Sektor ini memiliki potensi pendapatan sekitar Rp1.609 triliun untuk konstruksi dan Rp2.524 triliun untuk realti selama 2016-2019. Segmen realti diperkirakan tumbuh sebesar 11,1% dari tahun 2016-2020 akibat pertumbuhan kelas menengah. Selain itu, bisnis hotel juga diperkirakan masih tumbuh walapun kompetisinya sudah ketat.

Berikut adalah sasaran anggaran infrastruktur APBN 2019:

Infrastruktur	Target
Jalan	1.834,7 km
Jembatan	37.177 meter
Jalan Tol Melalui LMAN	16 proyek
Jalan Tol Trans Sumatera	229 km
Penyelesaian Bandara Baru	4 bandara
Perumahan untuk MBR	68,9 ribu unit
Rusun	6.973 unit
Bendungan	48 unit
Jaringan Irigasi	170,4 ribu ha
Jalur kereta api	394,8 km'sp

Perseroan mempunyai pengalaman yang kuat di bisnis konstruksi, terbukti dengan keterlibatan perusahaan di berbagai sektor dan tipe proyek konstruksi (contoh: pembangunan jalan, jalur kereta api, proyek transportasi laut, proyek pengairan, dan lain-lain). Pengalaman tersebut menjadi kredensial Perseroan di proses tender dan membuka peluang proyek di berbagai sektor.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016, Perseroan telah ditunjuk pemerintah sebagai kontraktor Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Proyek dengan skala besar ini akan meningkatkan kredensial Perseroan di bidang konstruksi kereta api. Selain itu, proyek ini berpotensi untuk memicu perkembangan bisnis lainnya di luar LRT, seperti pengembangan properti di sekitar stasiun LRT. Sejak tahun 2017, Perseroan berencana memulai penjualan properti di sekitar stasiun LRT.

Walaupun jasa konstruksi masih merupakan bisnis utama Perseroan, dengan kondisi kompetisi di bidang ini yang cukup ketat dan industri konstruksi yang sangat tergantung dengan alokasi APBN, mengakibatkan diperlukannya diversifikasi bisnis untuk mengurangi risiko volatilitas pendapatan. Sehingga saat ini Perseroan telah masuk ke bidang non-konstruksi seperti properti, hotel, dan manufaktur beton. Secara umum, margin laba ketiga bidang tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan margin konstruksi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan margin laba Perseroan secara keseluruhan.

Inisiatif Perseroan untuk mengembangkan bisnis di bidang properti, dan hotel diharapkan dapat meningkatkan recurring income di luar bisnis utama konstruksi. Pemilihan properti sebagai salah satu engine of growth dilakukan mengingat ADHI sedang melakukan pembangunan LRT Jabodebek. Pembangunan tersebut berdampak pada munculnya potensi proyek-proyek internal ADHI seperti TOD, peningkatan konstruksi gedung melalui Adhi Persada Gedung (APG), dan peningkatan kapasitas pemakaian beton pada Adhi Persada Beton (APB). Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan investasi di berbagai sektor, seperti kelistrikan dan pengolahan air.

Secara umum, tujuan ADHI dalam lima tahun kedepan meliputi pembentukan citra baru ADHI sebagai perusahaan yang sedang berevolusi, memaksimalkan keunggulan TOD, menginisiasi proyek-proyek infrastruktur melalui skema investasi dan menjadi perusahaan yang memberikan produk dan jasa dengan excellent quality.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.029.500.000.000,- (satu triliun dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)			Persentase (%)
		A	B	Total	
1.	PT Bahana Sekuritas	Rp91.000.000.000	Rp75.000.000.000	Rp166.000.000.000	16,12
2.	PT BCA Sekuritas	Rp22.000.000.000	Rp48.000.000.000	Rp70.000.000.000	6,80
3.	PT BNI Sekuritas	Rp215.000.000.000	Rp133.000.000.000	Rp348.000.000.000	33,80
4.	PT Danareksa Sekuritas	Rp73.000.000.000	Rp121.500.000.000	Rp194.500.000.000	18,89
5.	PT Mandiri Sekuritas	Rp155.000.000.000	Rp96.000.000.000	Rp251.000.000.000	24,38
Total		Rp556.000.000.000	Rp473.500.000.000	Rp1.029.500.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang merupakan pihak yang Terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 19 Juni 2019 yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI;

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjataan adalah tanggal 21 Juni 2019.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2019 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 8000 28973500
PT Bahana Sekuritas

Bank Central Asia
Cabang: KCK Menara BCA
No. Rekening: 206 3828955
PT BCA Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 014-003-4143
PT BNI Sekuritas

Bank Permata
Cabang: Sudirman
No. Rekening: 400 1763690
PT Danareksa Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang: Jakarta Pondok Indah
No. Rekening: 00971134003
PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka;

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda kenaikan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka

Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini dalam masa Penawaran Umum pada tanggal 19 Juni 2019.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5889
www.bahanasekuritas.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (62 21) 2554 3946
Faksimili: (62 21) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350 9777
Faksimili: (021) 350 1817
www.danareksa.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3603/3507
www.mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN